

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan perkenan Nya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2021 telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2021 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Cimahi serta merupakan turunan dari Rencana Strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan fokus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Pada Tahun 2021 Bappenda Kota Cimahi merencanakan 2 Program, 8 Kegiatan, dan 27 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.601.462.996,- (tiga belas milyar enam ratus satu juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah). Secara umum, Bappenda Kota Cimahi telah dapat melaksanakan program/ kegiatan pada tahun sebelumnya.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Bappenda Kota Cimahi membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak

Cimahi, 17 November 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH



Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi	II-1
2.2 Analisis Kinerja Bappenda Kota Cimahi	II-10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappenda	II-18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran	III-3
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappenda Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Bappenda Sampai Dengan Tahun 2019	II-2
Tabel 2.2. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal	II-11
Tabel 2.3. Analisis Desentralisasi Fiskal Kota Cimahi Tahun 2017-2019	II-11
Tabel 2.4. Komposisi PAD Kota Cimahi Tahun 2019	II-12
Tabel 2.5. Rata-Rata Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi	II-13
Tabel 2.6. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017-2019	II-14
Tabel 2.7. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2017-2019	II-14
Tabel 2.8. Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-2019	II-15
Tabel 2.9. Target Dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2017-2019	II-16
Tabel 2.10. Target Dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2017-2019	II-16
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021	III-4
Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021	IV-3

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Strategi Peningkatan Asli Daerah (PAD)	II-17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rencana kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2020 merupakan rencana tahunan keempat dalam pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang memuat rencana capaian indikator-indikator sebagai ukuran keberhasilan. Pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat serta muatan lokal lainnya. Berkaitan dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai tujuan yang harus dicapai yaitu Meningkatkan Desentralisasi Fiskal agar tidak selalu bergantung kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Bappenda Kota Cimahi adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat sangat strategisnya posisi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam mewujudkan kemandirian dalam dinamika pembangunan Kota Cimahi yang berkesinambungan, maka Rencana Kerja (Renja) perubahan Bappenda Kota Cimahi lebih ditekankan

RENCANA KERJA TAHUN 2021

kepada peningkatan pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Cimahi, karena untuk mewujudkan Visi Kinerja Pembangunan Kota Cimahi tentunya harus bergantung pada realisasi pendapatan daerah yang besar.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 adalah manifestasi dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu di dalam Prioritas Kinerja Pembangunan Kota Cimahi Urusan Sektor Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian maupun Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dalam Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah dan Program Perencanaan Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah. Disamping itu, Renja yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 berpedoman pada landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
22. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 162).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 disusun untuk dijadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal lingkup perangkat daerah maupun tingkat Kota Cimahi dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 serta visi dan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

1.3.1. Maksud

- a. Menjadi Pedoman bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi didalam melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berjalan.
- b. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- c. Menjadi bahan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam menyusun Anggaran Belanja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

- a. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;

- b. Pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana, terarah, efisien, dan efektif.
- c. Sebagai alat ukur untuk melakukan evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari tahun ke tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2021, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Bappenda Tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Bappenda, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja bappenda, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama setahun.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat tentang rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan badan pengelola pendapatan daerah Kota Cimahi yang akan dicapainya pada Tahun Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi tahun lalu ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 dan capaian tahun 2020 sampai dengan triwulan III. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019, dan realisasi renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappenda dan realisasi APBD.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappenda Tahun 2018 dan
Pencapaian Renstra Bappenda Sampai Dengan Tahun 2019
Kota Cimahi

Ko de	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (RENJA BAPENDA) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BAPENDA Sampai Dengan	
					Target RENJA BAPENDA Tahun 2018	Realisasi RENJA BAPENDA Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sampai Dengan Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah (Desentralisasi Fiskal)	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	35,91%	22,32%	25,40%	25,45%	100,20%	30,28%	25,47%	84,11%
	Meningkatkan PAD	Persentase (%) Peningkatan PAD per tahunnya	17,63%	23,04%	4,38%	-12,74%	-290,87%	42,94%	5%	11,64%
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (2018) Perencanaan Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah (2019-2022)	Persentase peningkatan Pajak Daerah	7,00%	47,59%	5,00%	-18,52%	-370,40%	5,00%	5,00%	100,00%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul	3 modul	3	3	3	100,00%	3	3	100,00%
	Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah dokumen penetapan target pendapatan murni dan perubahan	4 dokumen	2	4	4	100,00%	4	4	100,00%
	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	182326 SPPT	150.000	150.000	150.000	100,00%	157.500	157.500	100,00%

Ko de	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (RENJA BAPENDA) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BAPENDA Sampai Dengan	
					Target RENJA BAPENDA Tahun 2018	Realisasi RENJA BAPENDA Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sampai Dengan Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi	134.330 data	9 jenis pajak	134.330 data	138.786 data	103,32%	134.330 data	134.330 data	100,00%
		Persentase pencapaian realisasi Pendapatan Daerah	92,00%	106,33%	90,00%	96,89%	107,66%	90,00%	90,00%	100,00%
	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan	Jumlah dokumen Raperda Pajak dan	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan	72 kali kegiatan	12 kali	72 kali kegiatan	71 kali	98,61%	72 kali kegiatan	72 kali kegiatan	100,00%
	Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah pemeriksaan	1200 objek pajak	36 WP	1200 objek pajak	1192 objek pajak	99,33%	1200 objek pajak	1200 objek pajak	100,00%
	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	575 orang	475 orang	475 orang	875 orang	184,21%	500 orang	500 orang	100,00%
	Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	Persentase peningkatan jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	75,00%	75,00%	75,00%	99,08%	132,11%	75%	75%	100,00%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran (2018)	Capaian cakupan pelayanan administrasi perkantoran	80%	96,79%	80%	102,46%	128,08%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%			

Ko de	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (RENJA BAPENDA) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BAPENDA Sampai Dengan	
					Target RENJA BAPENDA Tahun 2018	Realisasi RENJA BAPENDA Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sampai Dengan Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan yang mendapat jasa jaminan	37 unit	38 unit	10 buah roda empat, 27 buah roda dua	10 buah roda empat, 27 buah roda dua	100,00%			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat jasa pemeliharaan dan perizinan	37 unit	38 unit	10 buah roda empat, 27 buah roda dua	10 buah roda empat, 27 buah roda dua	100,00%			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan tersedianya jasa teknis dan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan terlaksananya jasa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis barang	95 jenis ATK, 1500 buah materai 3000; 2000 buah materai 6000	70 jenis	95 jenis ATK, 1500 buah materai 3000; 2000 buah materai	97 jenis ATK, 1500 buah materai 3000; 2000 buah materai	102,11%			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	19 blanko & Formulir Cetakan, 100.000 lembar penggandaan	23 blanko cetakan, 137.750 penggandaan	19 blanko & Formulir Cetakan, 100.000 lembar penggandaan	19 blanko & Formulir Cetakan, 94.400 lembar penggandaan	94,40%			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik	12 jenis alat listrik	9 jenis komponen	12 jenis alat listrik	12 jenis alat listrik	100,00%			
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	12 jenis peralatan rumah tangga	13 jenis	12 jenis peralatan rumah tangga	12 jenis peralatan rumah tangga	100,00%			

Ko de	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (RENJA BAPENDA) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BAPENDA Sampai Dengan	
					Target RENJA BAPENDA Tahun 2018	Realisasi RENJA BAPENDA Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sampai Dengan Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%			
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik	12 bulan	7 jenis	12 bulan	12 bulan	100,00%			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan kunjungan tamu	22 kali rapat ; 11 kali kunjungan tamu	58 kali	22 kali rapat ; 11 kali kunjungan	30 kali rapat ; 11 kali kunjungan tamu	124,24%			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	44 orang	50 orang	44 orang	50 orang	113,64%			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Sarana prasarana yang dipelihara	80%	90%	80%	93,33%	116,66%	80%	80%	100,00%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur	10 jenis	98 unit	10 jenis	8 jenis	80,00%			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan (pemberian BBM)	12 bulan	10 R4, 28 R2	12 bulan	12 bulan	100,00%			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	66 unit	12 bulan	12 bulan	100,00%			

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (RENJA BAPENDA) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BAPENDA Sampai Dengan	
					Target RENJA BAPENDA Tahun 2018	Realisasi RENJA BAPENDA Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sampai Dengan Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan Penyediaan ATK	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100,00%
	Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100,00%
	Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	jumlah pengadaan dan pemeliharaan	37 unit					37 unit	37 unit	100,00%
	Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	jumlah pengadaan dan pemeliharaan meubel	1 unit					1	1	100,00%
	pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	jumlah unit peralatan kantor	1 unit					1	1	100,00%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100,00%
	Penyediaan gudang kantor	jumlah gudang	1 unit					1	1	100,00%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	1 set					1	1	100,00%
	Penataan arsip daerah	jumlah arsip aktif dan inaktif	4000 surat					4000 surat	4000 surat	100,00%

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (RENJA BAPENDA) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BAPENDA Sampai Dengan	
					Target RENJA BAPENDA Tahun 2018	Realisasi RENJA BAPENDA Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sampai Dengan Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakeriaan	jumlah bulan THL yang diasuransikan	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100,00%
	Pengadaan seragam pegawai	jumlah set seragam pegawai	43 set					43 set	43 set	100,00%
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan					12 bulan	12 bulan	100,00%
	Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	50 kali					40	40	100,00%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% ASN yang dibina	80%	50,00%	80%	72,73%	90,91%	80%	80%	100,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	44 orang	-	44 orang	20 orang	45,45%			
	Pembinaan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan pegawai	77 orang	70 orang	77 orang	77 orang	100,00%			
	Pengembangan Kapasitas Sumber daya Pegawai	jumlah ASN yang dibina dan dilatih	121 orang					121	121	100,00%
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% capaian penyerapan anggaran	90%	100,00%	90%	100,00%	111,11%	90%	90%	100,00%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	22	24	22	22	100,00%			
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2	2	2	2	100,00%			

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (RENJA BAPENDA) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BAPENDA Sampai Dengan	
					Target RENJA BAPENDA Tahun 2018	Realisasi RENJA BAPENDA Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sampai Dengan Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	1	1	1	100,00%			
	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	jumlah dokumen	9					9	9	100,00%
	Penyusunan Renstra dan Renja PD	jumlah dokumen	8					9	9	100,00%
	Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	jumlah dokumen	4					4	4	100,00%
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	3					3	3	100,00%

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2019

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2019 dan capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tahun 2018, program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan Tahun 2019-2022 Program tersebut disesuaikan dengan nomenklatur baru yaitu Program Perencanaan Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah sehingga dapat dilihat pada tabel diatas ada pergantian nama Program sedangkan untuk kegiatan didalamnya tidak mengalami perubahan apapun. Hal ini dikarenakan rencana kerja Tahun 2018 masih merupakan peralihan dan penyesuaian dari Renstra Tahun 2012-2017 ke Renstra Tahun 2017-2022.
2. Penyesuaian tersebut juga berpengaruh pada program dan kegiatan pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran beserta kegiatan-kegiatan didalamnya pada Tahun 2018 tidak ada lagi di Tahun 2019-2022. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur beserta kegiatan-kegiatan didalamnya (2018) tidak ada lagi di Tahun 2019-2022. Kedua program tersebut diganti dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2019-2022) dengan kegiatan-kegiatan baru di dalamnya.
3. Selain itu masa penyesuaian mengakibatkan Kegiatan-Kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berubah dari dua kegiatan (2018) menjadi satu kegiatan saja (2019-2022). Begitu pula kegiatan-kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan semula tiga kegiatan (2018) menjadi empat kegiatan.
4. Pencapaian tujuan Bappenda Tahun 2018 yaitu Meningkatkan Desentralisasi Fiskal telah tercapai dengan baik yaitu 100,20%
5. Pencapaian sasaran Bappenda Tahun 2018 yaitu **“Meningkatnya PAD”** tidak tercapai dengan baik dikarenakan perhitungan peningkatan PAD Tahun 2018 dihitung dari selisih antara realisasi tahun 2018 dengan realisasi tahun 2017. Masalah terjadi karena pada Tahun 2017 terjadi anomali dimana penerimaan Pajak BPHTB dan PBB melonjak tinggi yang diakibatkan adanya program pemerintah pusat tax amnesty. Saat realisasi tahun 2017 itu

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terjadi ketimpangan, realisasi tahun 2018 menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya walaupun sebenarnya bila dilihat rata-rata selama lima tahun terakhir sebetulnya realisasi tahun 2018 bisa dikatakan sudah meningkat dengan wajar. Dari masalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan indikator kinerja program belum dapat mengantisipasi anomali-anomali seperti tersebut diatas.

6. Penjelasan mengenai anomali yang terjadi pada poin sebelumnya juga berakibat pada pencapaian salah satu Indikator Program Bappenda Tahun 2018 yaitu **“Peningkatan Pajak Daerah”**. Indikator ini dinilai menjadi kurang baik, padahal bila dilihat rata-rata lima tahun kebelakang, peningkatan pajak daerah tahun 2018 sudah meningkat dengan wajar.
7. Pada umumnya pencapaian target indikator kegiatan (output) sudah tercapai dengan baik. Pencapaian target indikator program (outcome) sebenarnya sudah tercapai dengan baik namun masih ada masalah dalam perencanaan indikator kinerja Program. Semua ini berdampak pada pencapaian tujuan Bappenda yaitu meningkatkan desentralisasi fiskal yang juga sudah tercapai dengan baik;

2.2. Analisis Kinerja Bappenda Kota Cimahi

2.2.1. Analisis Desentralisasi Fiskal

Menurut Bisma (2010 : 78) Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

*Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991
dalam Bisma (2010:78)*

Rumusan rasio kemandirian daerah yaitu :

$$\text{Kemandirian } i = \frac{\text{PAD } i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i}$$

Keterangan :

PAD_i = Realisasi PAD Tahun Sekarang

Tabel 2.3
Analisis Desentralisasi Fiskal Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2019

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi PAD	Rasio PAD Terhadap Pendapatan	Tingkat Kemandirian Daerah
2017	1,481,647,893,979.88	383,911,991,301.88	25.91%	Sedang
2018	1,316,230,476,122.39	335,016,530,127.39	25.45%	Sedang
2019	1.433.371.386.973,96	360.955.331.172,96	25.18%	Sedang

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018, dan 2019

Keterangan :

Sangat Baik = 50% <
Baik = 40%-50%
Cukup = 30%-40%
Sedang = 20%-30%
Kurang = 10%-20%
Sangat Kurang = 0%-10%

Berdasarkan hasil analisis diatas maka secara umum indikator kinerja sasaran Bappenda Kota Cimahi dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah rata-rata berada pada kategori posisi sedang.

Tabel 2.4
Komposisi PAD Kota Cimahi
Tahun 2019

No	Komponen PAD	Realisasi	(%) Persentase Terhadap PAD
1	Pajak Daerah	163.136.977.065	45,20%
2.	Retribusi Daerah	15.832.320.921	4,39%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.297.600.000	5,38%
4.	Lain-lain PAD yang sah	172.688.433.186,96	47,84%
	JUMLAH	360.955.331.172,96	100%

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018, dan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyumbang terbesar dari PAD berasal dari komponen Lain-lain PAD yang sah, yang didalamnya merupakan pendapatan dari BLUD, yaitu sebesar 47,84%, kemudian disusul oleh komponen pajak daerah sebesar 45,20%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 5,38% dan retribusi daerah 4,39%.

2.2.2. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017 - 2019

Capaian persentase pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh Bappenda Kota Cimahi dari Tahun 2017 - 2019, setiap tahunnya melampaui dari target PAD yang telah di tetapkan, rata-rata persentase capaian sebesar 109,29%. Penyumbang PAD terbesar dilihat berdasarkan persentase rata-rata realisasi terhadap target dari setiap tahunnya berasal dari komponen pajak daerah sebesar 114,83%, Lain-lain PAD yang sah sebesar 106,47%, kemudian retribusi daerah sebesar 103,90% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tabel penyajian rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2017 - 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rata-Rata Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi
Tahun 2017 - 2019

No	Komponen PAD	Target			Realisasi			Capaian (%)			Rata-rata
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	Pajak Daerah	116.923.551.744	132.108.046.123,69	161.488.910.896,42	165.391.683.082	134.770.330.583	163.136.977.065	141,45	102,02	101,02	114,83
2.	Retribusi Daerah	9.354.664.440	13.042.067.600	14.585.901.970,86	10.239.610.285	12.220.530.827	15.832.320.921	109,46	93,70	108,55	103,90
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.256.000.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.256.000.000	9.391.200.000	9.297.600.000	100	100	100	100
4.	Lain-lain PAD yang sah	175.440.496.864,44	172.301.380.460,24	168.838.660.768	199.024.697.934,88	178.634.468.717,39	172.688.433.186,96	113,44	103,68	102,28	,106,47
	JUMLAH	310.974.713.048,44	326.842.694.183,93	354.211.073.635,28	383.911.991.301,88	335.016.530.127,39	360.955.331.172,96	123,45	102,50	101,90	109,29

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018, dan 2019

2.2.3. Analisis Pertumbuhan PAD Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mengalami pertumbuhan positif dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pajak daerah pada tahun 2017-2019 sebesar 114,83%, sedangkan capaian realisasi dari hasil retribusi daerah pada tahun 2019 adalah sebesar 101,02% dari target sebesar Rp. 161.488.910.896,42, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2017-2019

No	Komponen PAD	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Pajak Daerah	116.923.551.744	132.108.046.123,69	161.488.910.896,42	165.391.683.082	134.770.330.583	163.136.977.065	141,45	102,02	101,02

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018 dan 2019

2.2.4. Analisis Pertumbuhan PAD Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh perangkat daerah penghasil, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil retribusi daerah pada tahun 2017-2019 sebesar 103,90%, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2019 sebesar 108,55% dari target sebesar Rp. 14.585.901.970,86, hal tersebut merupakan pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun 2017-2019

No	Komponen PAD	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Retribusi Daerah	9.354.664.440	13.042.067.600	14.585.901.970,86	10.239.610.285	12.220.530.827	15.832.320.921	109,46	93,70	108,55

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018 dan 2019

2.2.5. Analisis Pertumbuhan PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yaitu lembaga keuangan Bank oleh Bank Jabar, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2017-2019 sebesar 100%, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2019 sebesar 100% dari target sebesar Rp. 9.297.600.000, pendapatan ini mempunyai pertumbuhan yang tetap dan masih dalam pertumbuhan positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

Tabel 2.8
Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2017-2019

No	Komponen PAD	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.256.000.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.256.000.000	9.391.200.000	9.297.600.000	100	100	100

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018 dan 2019

2.2.6. Analisis Pertumbuhan PAD Hasil Lain-lain PAD yang Sah

Hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi jasa usaha, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD), sumbangan pihak ketiga, dana kapitasi JKN pada FKTP, dan dana non kapitasi.

Rata-rata realisasi capaian dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2017-2019 sebesar 106,47%, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2019 sebesar 102,28% dari target sebesar Rp. 168.838.660.768, pendapatan tersebut adanya pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

Tabel 2.9
Target Dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Tahun 2017-2019

No	Komponen PAD	Target			Realisasi			(%) Persentase Terhadap PAD		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Lain-lain PAD yang Sah	175.440.496.864,44	172.301.380.460,24	168.838.660.768	199.024.697.934,88	178.634.468.717,39	172.688.433.186,96	113,44	103,68	102,28

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018 dan 2019

2.2.7. Faktor Yang Mendorong Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Faktor-faktor yang mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan wajib pajak melalui Pembayaran pajak daerah secara online yang mendorong kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak melalui kerjasama dengan lembaga perbankan, PT. Pos Indonesia dan e-commerce.
2. Kebijakan pusat (kenaikan tarif yang terkait dengan pajak daerah)
3. Pertumbuhan ekonomi kota yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
4. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan angka pengangguran oleh Pemerintah Kota Cimahi sehingga meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah.
5. Kondisi makro ekonomi nasional yang kondusif

2.2.8. Faktor Yang menghambat Peningkatan Pajak Daerah.

Faktor-faktor yang menghambat peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional profesional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru Sita dan lainnya.
2. Tidak adanya sumber daya alam yang potensial.
3. Luas wilayah yang relatif kecil (40 km²) dimana sepertiga wilayah adalah pusat pendidikan militer.

4. Masalah perizinan (Air tanah, reklame).
5. Data Base belum valid (PBB).
6. Masih lemahnya pertumbuhan ekonomi kota yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
7. Masih lemahnya koordinasi sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
8. Kondisi makro ekonomi nasional yang kurang kondusif dan pengaruh negatif eksternal lainnya.

2.2.9. Potensi Baru

Strategi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pendekatan Teknis, yaitu :
 - a. Ekstensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan cara menggali/mencari potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.
 - b. Intensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi sumber PAD yang sudah ada.
2. Pendekatan Yuridis, yaitu meningkatkan PAD melalui pembuatan atau penyempurnaan regulasi.

Gambar 2.1
Strategi Peningkatan Asli Daerah (PAD)



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappenda

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda Kota Cimahi masih terdapat kendala diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional profesional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru sita dan lainnya
2. Masalah perizinan (Air tanah, reklame)
3. Data Base belum valid (PBB)
4. Masih lemahnya koordinasi sinergis dengan Perangkat Daerah terkait
5. Tidak adanya SDA potensial
6. Kondisi makro ekonomi nasional yang kurang kondusif
7. Pertumbuhan ekonomi kota belum secara signifikan meningkatkan daya beli masyarakat
8. Seiring berjalannya waktu maka potensi pajak meningkat namun belum dilakukan pembaharuan potensi pajak.

Hal ini tentu berdampak pada tidak terlaksananya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas secara maksimal. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi terus melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan-pelatihan teknis pengelolaan pajak daerah serta diklat-diklat lainnya yang berkaitan denganTupoksi.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dengan memberikan *reward* kepada yang berprestasi dan *punishment* yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan koordinasi yang sinergis seoptimal mungkin dengan instansi maupun aparat terkait.
4. Melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
5. Penerapan sanksi hukum secara tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut ini disajikan review terhadap Rancangan Awal RKPD :

RENJA KERJA TAHUN 2021

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Realisasi target pendapatan daerah	91%	1.999.202.600	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Realisasi target pendapatan daerah	91%	1.999.202.600	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	1.999.202.600	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	1.999.202.600	
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 Dokumen	59.905.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 Dokumen	59.905.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah sistem yang diberikan	3 Sistem	385.190.700	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah sistem yang diberikan	3 Sistem	385.190.700	
		Jumlah sistem yang dikembangkan	2 Sistem				Jumlah sistem yang dikembangkan	2 Sistem		
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	2969 WP	847.447.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	2969 WP	847.447.000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah dokumen produk hukum	1 Dokumen	64.454.200	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah dokumen produk hukum	1 Dokumen	64.454.200	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diberi penyuluhan/ pendampingan	250 Orang	138.008.200	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diberi penyuluhan/ pendampingan	250 Orang	138.008.200	
Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang dilaksanakan penagihan	250 Orang	371.189.900	Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang dilaksanakan penagihan	250 Orang	371.189.900	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang diperiksa	300 Objek Pajak	109.455.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang diperiksa	300 Objek Pajak	109.455.000	

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		% Sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100%	11.602.260.396	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		% Sarana dan prasarana yang terfasilitasi	100%	11.602.260.396	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	95.140.300	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	95.140.300	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen Renja	1 Dokumen	47.450.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen Renja	1 Dokumen	47.450.100	
		Jumlah dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen				Jumlah dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen		
		Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 Kegiatan				Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 Kegiatan		
		Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen				Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen	5.833.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen	5.833.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen LKIP yang terkoordinasikan	1 Dokumen	41.807.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen LKIP yang terkoordinasikan	1 Dokumen	41.807.200	
		Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD yang terkoordinasikan	2 Dokumen				Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD yang terkoordinasikan	2 Dokumen		
		Jumlah laporan monev kinerja triwulanan	4 Dokumen				Jumlah laporan monev kinerja triwulanan	4 Dokumen		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	10.498.029.896	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	10.498.029.896	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	41 Pegawai	10.457.656.096	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	41 Pegawai	10.457.656.096	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	2 Dokumen	40.373.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	2 Dokumen	40.373.800	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	21.750.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	21.750.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	5 Pegawai	21.750.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	5 Pegawai	21.750.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	444.480.600	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	444.480.600	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik dan penerangan	12 Bulan	2.399.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik dan penerangan	12 Bulan	2.399.800	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	98.329.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	98.329.300	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah set peralatan rumah tangga	2 Set	7.892.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah set peralatan rumah tangga	2 Set	7.892.400	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12 Bulan	20.250.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12 Bulan	20.250.000	

RENJA KERJA TAHUN 2021

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	85.669.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	85.669.100	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	79.590.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	79.590.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	150.350.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	150.350.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	77.675.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	77.675.000	
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi gedung kantor	12 Bulan	77.675.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi gedung kantor	12 Bulan	77.675.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	235.424.600	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Peningkatan PAD	5,17%	235.424.600	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	12 Bulan	82.679.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	12 Bulan	82.679.200	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah bulan jasa komunikasi Jumlah bulan jasa listrik	12 Bulan 12 Bulan	27.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah bulan jasa komunikasi Jumlah bulan jasa listrik	12 Bulan 12 Bulan	27.600.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	2 Set	125.145.400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	2 Set	125.145.400	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Peningkatan PAD	5,17	229.760.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Peningkatan PAD	5,17	229.760.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 Unit	164.260.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 Unit	164.260.000	
		Jumlah unit kendaraan	10 Unit				Jumlah unit kendaraan	10 Unit		
		Jumlah bulan pemberian BBM	12 Bulan				Jumlah bulan pemberian BBM	12 Bulan		
		Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 Unit				Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 Unit		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 Bulan	65.500.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 Bulan	65.500.000	

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan renja dilaksanakan kegiatan forum perangkat daerah yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan stakeholder terkait. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mempertajam indikator dan sinergitas program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Dari pelaksanaan forum perangkat daerah itu sendiri diperoleh masukan sebagai berikut :

1. Sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan renja bappenda dan aspirasi masyarakat serta stakeholder terkait akan diwujudkan dalam forum perangkat daerah ini karena aspirasi berupa statement yang telah dihasilkan dari diskusi sidang kelompok akan disinergikan dengan rancangan program dan kegiatan bappenda yang telah disusun.
2. Reklasifikasi NJOP PBB adalah satu hal yang paling disoroti dalam forum ini karena menyangkut kepentingan beberapa stakeholder. Hal ini akan sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Cimahi yang dampaknya sesuai dengan sasaran bappenda itu sendiri yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk pelaksanaannya harus ditindaklanjuti dengan pengkoordinasian semua stakeholder terkait juga dengan membuat kebijakan agar reklasifikasi ini dapat tepat sasaran.

Berikut ini usulan program dan kegiatan Bappenda Kota Cimahi dari para pemangku kepentingan pada tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.10
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kota Cimahi

Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan
Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	
Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Realisasi pendapatan daerah	91%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Peningkatan PAD	5,17%	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 Dokumen	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah sistem yang diberikan pemeliharaan	3 Sistem	
								Jumlah sistem yang dikembangkan	2 Sistem	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	2969 WP	
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah dokumen produk hukum	1 Dokumen	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diberi penyuluhan/ pendampingan	250 Orang	
						Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang dilaksanakan penagihan	250 Orang	
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang diperiksa	300 Objek Pajak	
Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	% Sarana dan prsarana yang dipelihara	100%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen Renja	1 Dokumen	
								Jumlah dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen	
								Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 Kegiatan	
								Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen LKIP yang terkoordinasikan	1 Dokumen	
								Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD yang terkoordinasikan	2 Dokumen	
								Jumlah laporan monev kinerja triwulanan	4 Dokumen	

Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan
Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	41 Pegawai	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	2 Dokumen	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	5 Pegawai	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik dan penerangan	12 Bulan	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah set peralatan rumah tangga	2 Set	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12 Bulan	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah bulan cetak dan penggandaan	12 Bulan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi gedung kantor	12 Bulan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	12 Bulan	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 Bulan	
								Jumlah bulan jasa listrik	12 Bulan	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	2 Set	

Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan
Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 Unit	
								Jumlah unit kendaraan	10 Unit	
								Jumlah bulan pemberian BBM	12 Bulan	
								Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 Unit	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 Bulan	

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAPPENDA KOTA CIMAHI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagai berikut :



Visi dan misi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dapat terwujud jika didukung pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik agar kemandirian dalam segi pembiayaan pembangunan dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik akan mendukung dalam menciptakan kemandirian Pemerintah Daerah, yang merupakan cikal bakal dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri.

Agenda pembangunan nasional untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya menjadi tujuan yang harus dicapai dalam perencanaan strategis Bappenda. Hal ini tercantum dalam Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Secara tidak langsung tugas pokok dan fungsi Bappenda sangat berkaitan dengan agenda ini.

Bappenda Kota Cimahi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki peran yang strategis dalam pendanaan pembangunan di daerah Kota Cimahi. Kelancaran pembangunan Kota Cimahi akan sangat bergantung pada keberhasilan Bappenda Kota Cimahi dalam mengelola pendapatan daerah.

Isu strategis Bappenda Kota Cimahi akan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMN dan RPJMD. Isu-isu strategis yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Cimahi Tahun 2017-2022, adalah :

1. Meningkatnya angka kemiskinan
2. Tingginya tingkat pengangguran terbuka
3. Tingginya ketimpangan pendapatan
4. Tingginya potensi dan kejadian bencana
5. Rendahnya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bertransportasi
6. Rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
7. Rendahnya kualitas lingkungan hidup
8. Belum optimalnya kualitas pendidikan
9. Belum optimalnya kualitas kesehatan
10. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan social
11. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat

12. Tingginya pertumbuhan penduduk
13. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

3.2. Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan dan terjalinnya sinergitas antara Pembangunan Pusat dan Daerah harus tercipta dengan baik, karena pada hakekatnya baik Pusat maupun Daerah memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan masyarakat madani yang sejahtera serta mandiri.

Daerah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut tentunya memiliki visi dan misi pembangunan termasuk Kota Cimahi, dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2017-2022, juga untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi serta target yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai Visi yaitu :

“PROFESIONAL DALAM PENGKOORDINASIAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH”.

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan dua misi yang diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi :

- Pertama,** Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah dan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil;
- Kedua,** Meningkatkan pelayanan melalui kinerja SDM, administrasi yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung;

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir (*Ultimate Goal*) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Bappenda merupakan penjabaran dari RENSTRA dan RPJMD Kota Cimahi, yaitu Meningkatkan Desentralisasi Fiskal dengan Indikator Tujuan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Sasaran organisasi juga merupakan penjabaran dari RENSTRA dan RPJMD Kota Cimahi. Sasaran strategisnya adalah Meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan PAD per tahunnya. Sasaran ini menjadi tanggung jawab pencapaian kinerja Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran Bappenda beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatkan Desentralisasi Fiskal		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,61%
	Meningkatnya PAD	Persentase Peningkatan PAD per Tahunnya	3,70%

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program kerja menjadi komponen penting bagi organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Di dalam sebuah organisasi perusahaan atau lainnya, terdapat program kerja yang dimana program ini telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Yang sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan utama. Dengan adanya program kerja maka setiap anggota atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur.

Dalam hal ini yang dimaksud program kerja adalah susunan rencana kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan.

Rencana kerja Bappenda Kota Cimahi disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra.

Hal tersebut dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang selaras dengan Visi dan Misi Perangkat Daerah, Bappenda Kota Cimahi telah menyusun beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, yaitu :

I Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - b. Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - c. Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - e. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - f. Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
 - g. Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - h. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

II Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD
- 4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik
 - e. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappenda Kota Cimahi selama 1 (satu) tahun pada tahun berjalan yang disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menjadi salah satu program prioritas RPJMD Kota Cimahi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, yang dijabarkan Bappenda Kota Cimahi kedalam rencana kegiatan berikut sub-sub kegiatannya untuk setiap program yang didasarkan dari penentuan strategi dan arah kebijakan Bappenda Kota Cimahi.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program disertai indikator kinerja dan kebutuhan pendanaannya, yang diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi tolak ukur keberhasilan/ kegagalan dari tujuan, sasaran dan program.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Bappenda Kota Cimahi tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang sedang dihadapi, dan usulan program/ kegiatan dari masyarakat disinergikan dengan tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi, maka diperoleh Rencana Kerja dan Pendanaan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021, sebagaimana disajikan dalam tabel, berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2021

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Realisasi pendapatan daerah	91%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Peningkatan PAD	5,17%	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 Dokumen	64.829.400
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen produk hukum	1 Dokumen	94.104.200
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan/ pendampingan	250 Orang	259.305.600
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sistem yang diberikan pemeliharaan	3 Sistem	459.123.600
							Jumlah sistem yang dikembangkan	2 Sistem	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP	314.930.600
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan pelaporan Basis data Pajak Daerah	Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP	51.921.000
						Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP	95.756.700
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP	615.561.100
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah WP yang mendapatkan pelayanan/ konsultasi	123 WP	10.240.000
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP	157.750.300
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	12 Kali	210.882.000
							Jumlah penagihan kepada WP self dan official Assesment	20 WP/ bulan	
							Jumlah penagihan pasif	1.116 WP	
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan dan pengurangan pajak daerah	400 WP	146.143.100

RENCANA KERJA TAHUN 2021

						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	240 Objek Pajak	116.772.200
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi daerah	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah	12 kali	49.212.800
Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	% Sarana dan Prasarana yang dipelihara	100%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1 Dokumen	77.011.800
							Jumlah dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen	
							Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 Kegiatan	
							Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP yang terkoordinasikan	1 Dokumen	70.855.500
							Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD yang terkoordinasikan	2 Dokumen	
							Jumlah laporan movev kinerja triwulanan	4 Dokumen	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	41 Pegawai	9.757.606.096
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan	2 Dokumen	47.646.800
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	5 Pegawai	25.250.000
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik dan penerangan	12 Bulan	2.399.800
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	174.434.700
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	2 Set	7.892.400
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12 Bulan	81.390.000
						Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	85.669.100
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	15.000.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	93.525.000

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan fasilitasi gedung kantor	12 Bulan	77.675.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	12 Bulan	95.904.200
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 Bulan	28.200.000
							Jumlah bulan jasa listrik	12 Bulan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 Unit	298.970.000
							Jumlah unit kendaraan	10 Unit	
							Jumlah bulan pemberian BBM	12 Bulan	
							Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 Unit	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 Bulan	65.500.000
JUMLAH TOTAL									13.651.462.996

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai satu kesatuan arah perencanaan strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022.

Renja PD tersebut sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah dengan muatan kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappenda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, selain itu dapat digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Renja PD Tahun 2021, ini nantinya akan menjadi tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Bappenda Kota Cimahi yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program dan kegiatan serta hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Renja PD Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Renja PD Tahun 2021 memuat 1 (satu) unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan keuangan, terdiri dari 2 (dua) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah mempunyai 8 (delapan) kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 13.601.462.996,-, terdiri dari :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah, sebagai penunjang pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) di bidang urusan keuangan.

2. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah, adalah untuk mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan kepegawaian serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan tersusunnya Renja PD ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional atau prioritas daerah.

Demikian Renja PD ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021. Disadari bahwa dalam penyusunan Renja PD ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Cimahi, 17 November 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH



Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002